

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan pelajaran yang sangat penting untuk membangun karakter, nilai-nilai moral, serta rasa nasionalisme para peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah pelajaran yang bertujuan untuk membentuk seseorang yang memiliki perbedaan baik dari perspektif agama, sosial budaya, bahasa, usia, serta etnis guna mereka dapat menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, mahir, dan berbudi pekerti, berserta landasan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, tujuan utamanya adalah menghasilkan individu yang baik, terampil, berpengetahuan, berbudi pekerti, serta loyal kepada bangsa dan negara Indonesia, yang tercermin dari cara berpikir dan bertindak yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Cahyani, 2021).

Hal tersebut dimaksud sejalan dengan sasaran dari pendidikan di tingkat kenegaraan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yakni bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas kemampuan peserta didik agar dapat berkembang menjadi individu yang memiliki iman, berperilaku baik, cerdas, serta berperan secara bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Samsuri dalam Cahyani (2021), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan diidentifikasi sebagai persiapan bagi pemuda guna berperan sebagai warga negara yang berpengetahuan luas, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk dapat berkontribusi secara langsung dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peserta didik mampu mengerti hak dan kewajiban mereka selaku bagian dari bangsa dan negara serta sanggup mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan aspek kewargaan, seperti integrasi bangsa, HAM, norma, nilai,

kehidupan demokrasi, Pancasila serta hukum dasar negara, dan juga mengenai internasionalisasi.

Demikian juga dengan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan berperilaku baik. Penjelasan tentang konsep warga negara yang cerdas dan berperilaku baik yang diutarakan oleh Winataputra yaitu individu yang memiliki kemampuan dalam tiga aspek, yaitu *civic disposition*, *civic knowledge*, serta *civic skills*. Selain itu dalam membentuk peserta didik agar dapat berkontribusi sebagai warga negara yang berintegritas, diperlukan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang saling mendukung dan melengkapi. Kompetensi kewarganegaraan menurut Branson, seperti dikutip oleh Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 186), terbagi menjadi tiga aspek yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta sikap kewarganegaraan. *Civic Skills* artinya Kecakapan Kewarganegaraan, *Civic Knowledge* artinya Pengetahuan Kewarganegaraan, dan *Civic Dispositions* artinya Watak Kewarganegaraan.

Civic skills menjadi pokok kajian dalam penelitian ini karena dipandang sebagai elemen krusial dalam pembentukan individu yang mampu berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, bekerja sama, dan mampu membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam masyarakat. Margaret Stimman Branson (1998) menegaskan:

“In order for citizens to effectively exercise their rights and fulfill their duties within self-governing communities, they must not only gain knowledge in areas such as those outlined by the five key questions mentioned earlier; they also need to develop the necessary intellectual and participatory skills.”

Jika warga negara dapat menjalankan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya dibutuhkan menguasai pengetahuan dasar yang telah dijelaskan dalam lima pertanyaan sebelumnya, tetapi juga harus memiliki kemampuan intelektual serta partisipatif yang sesuai.

Kecakapan intelektual mencerminkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi suatu masalah, menguraikan, menjelaskan, mengkaji secara komprehensif, memberikan suatu penilaian, serta dapat mengemukakan dan mempertahankan pendapat terkait pokok bahasan tertentu. Sedangkan, keterampilan partisipatif yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab, efektif, dan berdasarkan pengetahuan yang layak untuk memiliki peran penting dalam kehidupan berpolitik maupun interaksi sosial dalam masyarakat. Keterampilan kewarganegaraan menjadi salah satu elemen esensial yang selalu terus menerus dikembangkan pada setiap individu sebagai identitas yang diharapkan dari seorang warga negara yang berkarakter baik.

Winataputra (2001, hlm. 317) menjelaskan bahwa *civic skills* adalah "kumpulan keterampilan intelektual, sosial, dan individu yang diperlukan untuk membentuk warga negara yang dikuasai oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat". Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa elemen-elemen *civic skills* mencakup keterampilan intelektual, sosial, dan pribadi yang menjadi komponen utama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat nantinya. Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 188-190) menyatakan bahwa keterampilan kewarganegaraan mencakup dua aspek utama, yaitu keterampilan intelektual yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan partisipasi yang berupa kemampuan untuk terlibat secara tanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik maupun dalam masyarakat sipil.

Selain itu, Sapriya (2002, hlm. 72) dalam Hadian (2014) menggolongkan keterampilan kewarganegaraan mencakup tiga aspek utama, yaitu keterampilan menginvestigasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam buku yang berjudul "*The Role of Civic Skills in Fostering Civic Engagement*" tahun 2003, Kirlin mengklasifikasikan keterampilan kewarganegaraan ke dalam empat kategori, yaitu a) organisasi; b) komunikasi; c) pengambilan keputusan bersama; dan d) berpikir kritis. Pengelompokan berdasarkan analisis Kirlin terhadap berbagai pandangan ahli sebelumnya terkait keterampilan kewarganegaraan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut

bisa dikatakan *civic skills* adalah keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki oleh individu yang bisa berpartisipasi aktif, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan memiliki tanggung jawab sebagai pribadi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam realitas, mayoritas peserta didik yang belum mengembangkan karakter dan keterampilan yang optimal. Hal ini tercermin dari sikap, kebiasaan dan tindakan yang dilakukan peserta didik dalam keseharian. Peserta didik yang menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab, serta minimnya keterampilan dalam berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan sesama. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh M. Herlambang mengenai pendekatan yang diambil oleh guru dalam meningkatkan *soft skills* peserta didik pada kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran Aqidah dan Akhlak di kelas 10 MA Darussaalam yang berada di Kota Bengkulu. Kajian yang dilakukan berakar dari kondisi di mana terdapat sebagian peserta didik yang mengucapkan kata-kata kurang sopan kepada teman-teman dan guru mereka. Masih dijumpai peserta didik yang menunjukkan perilaku kurang terpuji, seperti malas saat belajar, serta peserta didik yang memiliki rasa percaya diri yang rendah saat menyampaikan pendapat di dalam kelas. Dengan demikian guru perlu melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang masih belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para peserta didik. Selama proses pendidikan, karakter peserta didik layak untuk diperhatikan dengan serius agar proses pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif saja tetapi mencakup kepada pembentukan perilaku, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan pada kegiatan sehari-hari.

Di zaman sekarang ini, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya berprestasi baik di bidang akademik tetapi juga memiliki sikap bermoral yang baik serta kemampuan nonakademik yang cukup (Susianita, 2024). Masalah utama yang sering muncul adalah kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara efektif masih rendah, baik saat berinteraksi dengan teman maupun dengan guru. Hal ini bisa dilihat dari sikap peserta didik yang cenderung menghindari diskusi kelompok atau merasa kurang percaya diri ketika harus menyampaikan pendapat di hadapan

banyak orang (Saputra, 2023). Selain itu, kurangnya kemampuan bekerja sama dalam tim menjadi hambatan besar dalam pembelajaran yang berbasis kerja sama. Banyak peserta didik lebih suka bekerja sendirian, meski tugasnya membutuhkan kerja sama dalam kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, mendengarkan pendapat mereka, dan membagi tugas serta tanggung jawab masih belum berkembang cukup baik (Hermansyah, 2021).

Kepemimpinan di antara para peserta didik sering kali kurang memuaskan, terlihat dari sedikitnya inisiatif mereka untuk turut serta aktif dalam kegiatan kelas atau organisasi sekolah. Mereka lebih suka mengikuti saja dari pada berani menjadi pemimpin atau mengarahkan kelompok mencapai tujuan bersama (Astuti, 2022). Selain itu, kesadaran tentang tanggung jawab pribadi dan rasa disiplin sering kali menjadi isu yang terlihat jelas. Misalnya, peserta didik sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, datang terlambat, atau tidak menghormati aturan yang sudah dibicarakan bersama. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa karakter seseorang belum berkembang dengan baik, terutama dalam mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan disiplin sejak usia muda (Lickona, 2022). Sebuah penelitian yang dikerjakan oleh Sriyono, Ginanjar, dan Darmawan pada tahun 2019 mengidentifikasi enam elemen yang mempengaruhi keterlibatan peserta didik di sekolah. Elemen-elemen tersebut meliputi keberanian untuk menyatakan opini, wawasan peserta didik, keberanian dalam memberikan jawaban, kemampuan untuk menarik kesimpulan, kemampuan untuk menjelaskan materi, dan memiliki kepercayaan diri. Sebesar 15% peserta didik yang berani mengajukan pertanyaan, sementara 6,25% peserta didik tidak mengajukan pertanyaan. Memberikan gambaran bahwa partisipasi peserta didik pada saat proses belajar dan di lingkungan sekolah masih sangat rendah. Ini mencerminkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk membentuk karakter peserta didik.

Oleh sebab itu, peran pendidikan dalam menanamkan nilai moral dan keterampilan sosial. Pendidikan di sekolah perlu menyeimbangkan antara pembelajaran intelektual dan pengembangan keterampilan. Sebagian dari keterampilan yang sebaiknya diberikan adalah keterampilan kewarganegaraan

(*civic skills*). Salah satu upaya untuk mendapatkan keterampilan kewarganegaraan dapat melalui mata pelajaran PPKn selain itu sekolah dalam mengoptimalkan keterampilan kewarganegaraan dapat juga menggunakan pendekatan lain seperti wadah pengembangan organisasi dilingkungan sekolah di antaranya wadah organisasi Gerakan Pramuka.

Melalui wadah organisasi Gerakan Pramuka peserta didik dilatih untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) seperti bekerja sama, berpartisipasi aktif, berpikir kritis, komunikasi dan bertanggung jawab. Kegiatan kepramukaan sebagai wadah kegiatan pengembangan di luar kurikulum yang mempunyai kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan membentuk karakter dan keterampilan bagi para peserta didik ini bukan sekadar pelaksanaan kegiatan yang disukai, melainkan juga merupakan tempat untuk menerapkan pelajaran hidup yang membantu membangun kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat. Gerakan Pramuka adalah sebuah wadah pendidikan nonformal yang membantu pertumbuhan karakter peserta didik dengan berbagai aktivitas yang bersifat interaktif, menyenangkan, dan menantang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kepramukaan tidak hanya menekankan pada pengembangan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai moral, disiplin, serta pengembangan sikap mandiri dan rasa tanggung jawab.

Mampu kita amati dari Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan Gerakan Pramuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap anggotanya agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, berjiwa patriotik, taat pada hukum, disiplin, menjunjung nilai-nilai yang baik bagi bangsa, serta memiliki kemampuan hidup yang baik sebagai pilar bangsa. Tujuan ini adalah untuk menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerapkan Pancasila, serta menjaga lingkungan hidup.

Kegiatan pramuka dilaksanakan dalam berbagai jenis seperti latihan setiap minggu, perkemahan, perlombaan keterampilan pramuka, musyawarah antar regu, pengujian tingkat kecakapan, serta kegiatan bakti sosial. Setiap jenis kegiatan mengembangkan kerja sama, kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab berperan secara langsung dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Dalam kegiatan lapangan seperti perkemahan, peserta didik diajarkan untuk hidup mandiri, mengatur tugas dalam kelompok, membuat keputusan bersama, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Kegiatan ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif, dan rasa peduli yang merupakan dasar keterampilan kewarganegaraan.

Sistem beregu dalam pramuka menciptakan pola kerja kelompok yang memberikan hasil yang baik, setiap anggota kelompok memiliki keterlibatan dan tugas yang terstruktur dengan jelas. Dengan cara ini, peserta didik memperoleh proses pembelajaran supaya dapat berkomunikasi, melakukan kerja sama, menjunjung tinggi perbedaan persepsi dan mendorong kepemimpinan yang demokratis. Selain itu, terdapat penekanan pada pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, kerja bakti lingkungan, dan aksi kemanusiaan. Kegiatan ini menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui berbagai pengalaman ini, pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan. Peserta didik tidak hanya mempelajari teori keterampilan kewarganegaraan, di samping itu menginternalisasikannya melalui pengalaman nyata yang membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan sosial secara berkelanjutan.

Hal tersebut juga didukung oleh Permendikdasmen yang mengharuskan kegiatan pramuka mendapatkan partisipasi dari seluruh peserta didik. Merujuk pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, pramuka dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Hal ini berfungsi sebagai aspek dari metode pembelajaran mendalam bertujuan mengoptimalkan penguatan karakter dan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Regulasi ini mengharuskan setiap sekolah untuk menyediakan program ekstrakurikuler, seperti kegiatan kepramukaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan bahwa setiap peserta didik dalam rangka diwajibkan berpartisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kepramukaan. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional. Prof Abdul Mu'ti selaku Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah menyatakan, penetapan organisasi Gerakan Pramuka sebagai kegiatan pengembangan diri yang wajib diikuti bukan hanya sebuah formalitas, melainkan strategi untuk mendorong pengalaman belajar yang lebih mendalam. Melalui pengalaman nyata di luar kelas, kegiatan kepramukaan diharapkan dapat memperkuat nilai karakter seperti kerja sama, tanggung jawab, kepemimpinan serta karakter kewarganegaraan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat pendidikan karakter dan keterampilan abad 21 dalam kurikulum nasional. Dengan menjadikan kepramukaan sebagai kegiatan wajib, pemerintah berupaya untuk memastikan proses belajar mengajar karakter tidak terbatas pada proses pembelajaran di kelas, tetapi berbasis pada pengalaman sosial, aktivitas kelompok, dan peningkatan potensi diri peserta didik secara terstruktur.

Oleh karena itu Gerakan Pramuka menjadi sebagian dari wadah organisasi efektif agar mengembangkan dan meningkatkan *civic skills* peserta didik karena di dalamnya terdapat pembelajaran yang berbasis pengalaman (*learning by doing*) yang bisa melatih kemandirian, kepemimpinan dan keterampilan sosial. Peserta didik dilatih untuk menjalani kehidupan bermasyarakat secara nyata. Kepramukaan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan keterampilan sosial yang dibutuhkan sebagai warga negara. Dalam rutinitas harian *civic skills* melengkapi pengetahuan akademik dan menjadikan peserta didik menjadi individu yang cerdas dalam pengetahuan, sosial dan emosional.

Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan pengembangan keterampilan warga negara memiliki sifat yang interaktif dan saling mendukung. Setiap kegiatan pramuka memerlukan partisipasi yang aktif, kepatuhan terhadap peraturan, kerja sama dalam kelompok, serta penyelesaian masalah secara demokratis. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat keterlibatan

peserta didik dalam kegiatan kepramukaan, semakin pesat pula perkembangan keterampilan kewarganegaraan yang mereka miliki. Dengan demikian kegiatan kepramukaan sebagai upaya meningkatkan pengembangan pembelajaran yang efektif dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan. Melalui pengalaman langsung yang didapatkan dari kegiatan kepramukaan, peserta didik bukan terbatas pada pemahaman konsep semata terkait kewarganegaraan bahkan mampu untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di tengah kemajuan zaman yang ditandai oleh peningkatan sikap individualisme dan penurunan kepedulian sosial di kalangan peserta didik, kepramukaan menjadi sarana yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai kebersamaan, gotong royong serta komitmen terhadap kehidupan sosial yang merupakan bagian dari keterampilan kewarganegaraan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua sekolah dapat memaksimalkan kegiatan kepramukaan sebagai media untuk membentuk keterampilan kewarganegaraan. Beberapa kegiatan masih terlihat sebagai formalitas, kurang direncanakan dengan baik, serta minim evaluasi mengenai dampak yang dihasilkan terhadap perkembangan karakter peserta didik. Beberapa faktor seperti kekurangan sarana pendukung, terbatasnya pemahaman para pembina, serta rendahnya partisipasi dari peserta didik menjadi penghalang bagi efektivitas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Situasi ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam untuk mengevaluasi seberapa jauh kegiatan kepramukaan dapat berkontribusi dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan secara nyata di sekolah.

SMP Negeri 14 Kota Bandung merupakan sekolah yang terletak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Wetan yang menerapkan ekstrakurikuler pramuka sebagai salah satu kegiatan yang diikuti peserta didik. Program kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 14 Kota Bandung seperti kegiatan latihan mingguan, kegiatan perkemahan, penerimaan tamu, pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), kenaikan tingkat pramuka penggalang yang terdiri dari Ramu, Rakit, dan Terap. Kegiatan seperti itu rutin dilaksanakan pada pangkalan SMP Negeri 14 Kota Bandung. Sekolah SMP Negeri 14 Kota

Bandung merupakan Gugus Depan yang aktif berkegiatan berdasarkan *monitoring* oleh Kwartir Ranting Bandung Wetan dan Kwartir Cabang Kota Bandung. Sekolah ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi sampai kepada tingkat Nasional yakni menjadi juara Lomba Tingkat 5 Nasional Tahun 2012 dan masih banyak kejuaraan yang sudah di menangkan oleh ekstrakurikuler pramuka SMP Negeri 14 Kota Bandung.

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pemimpin regu utama putra dan putri, diperoleh informasi bahwa peserta didik selalu mengikuti kegiatan kepramukaan secara rutin yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab terkait kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang diselenggarakan sekolah. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan karena pada saat latihan keterlibatan anggota menurun dengan ketidakhadiran dalam pelaksanaan kegiatan latihan rutin. Partisipasi anggota yang dinilai masih kurang aktif, meskipun masih cukup untuk menunjang kegiatan latihan rutin.

Selain itu koordinasi dewan penggalang belum optimal seperti sulit diatur dan adanya perbedaan pendapat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Meskipun demikian peserta didik menilai bahwa kegiatan kepramukaan tidak bersifat monoton karena di dalamnya terdapat berbagai bidang keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dewan penggalang merancang kegiatan semenarik mungkin agar materi dapat dipahami secara maksimal oleh anggota. Terkait kedisiplinan, bahwa pelanggaran aturan pernah terjadi, seperti keterlambatan hadir, atribut yang tidak lengkap dan tidak menggunakan seragam pramuka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan disiplin masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Dari sisi pembinaan, peserta didik telah mendapatkan bimbingan dan dorongan yang cukup dari pembina. Pembina memberikan kepercayaan kepada dewan penggalang untuk mandiri dalam mengelola kegiatan. Mengenai fasilitas yang tersedia di sekolah sarana dan prasarannya masih terbatas.

Terutama perlengkapan pionering seperti tongkat yang jumlahnya masih kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut dewan penggalang memanfaatkan fasilitas di luar sekolah, meminjam sarana dan prasarana pramuka Kota Bandung dan dewan penggalang memanfaatkan perlengkapan yang mereka punya yang bisa digunakan saat latihan rutin kegiatan kepramukaan. Masalah terbesar dalam pelaksanaan latihan rutin kegiatan kepramukaan adalah kurangnya koordinasi dewan penggalang dan rendahnya disiplin sebagian anggota, yang berdampak pada kurang tertatanya kegiatan. Dalam hal kepemimpinan mengungkapkan bahwa terkendala dalam membentuk anggota agar memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Hasil pengamatan awal peneliti di SMP Negeri 14 Kota Bandung kegiatan kepramukaan yang dilakukan peserta didik dapat membentuk berbagai keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan itu, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kegiatan kepramukaan berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik.

Penelitian tentang kepramukaan sebagian besar berfokus pada pembentukan karakter (disiplin, tanggung jawab, nasionalisme), sementara kajian tentang *civic skills* (keterampilan intelektual dan partisipasi) melalui kepramukaan masih sangat terbatas. Selain itu, lokasi penelitian di SMP Negeri 14 Kota Bandung belum pernah dikaji secara kualitatif-deskriptif terkait peran kepramukaan terhadap *civic skills*.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi pengetahuan akademik maupun dalam penerapan nyata dalam mengembangkan pendidikan karakter, serta membantu memperkuat peran kepramukaan sebagai sarana membentuk warga negara yang lebih aktif, tanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Dari penjelasan yang dipaparkan di atas menjadi dasar penulis mengambil judul **“Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam Membentuk *Civic Skills* Peserta Didik (Studi Deskriptif Di SMP Negeri 14 Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 14 Kota Bandung?
2. Bagaimana peran kegiatan kepramukaan dalam membentuk *civic skills* peserta didik?
3. Bagaimana bentuk *civic skills* peserta didik yang berkembang melalui kegiatan kepramukaan?
4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembentukan *civic skills* peserta didik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan kepramukaan di sekolah SMP Negeri 14 Kota Bandung.
2. Menganalisis peran kegiatan kepramukaan dalam membentuk *civic skills* peserta didik.
3. Mengidentifikasi bentuk *civic skills* yang dimiliki oleh peserta didik.
4. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan *civic skills* peserta didik melalui kegiatan kepramukaan.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat nyata dalam memajukan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama dalam studi tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kepramukaan. Penelitian ini juga membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kewarganegaraan peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan mengenai konsep keterampilan

kewarganegaraan sebagai kemampuan yang tidak hanya terbentuk lewat proses belajar intrakurikuler, tetapi juga melalui aktivitas di luar ekstrakurikuler. Peserta didik mendapatkan pengalaman langsung yang berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, partisipasi sosial, kepemimpinan, kerja sama, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi pembina pramuka dan guru: penelitian ini menyajikan pemahaman lebih terkait peran kepramukaan dalam membentuk *civic skills* peserta didik. Penelitian ini menjadi salah satu refleksi dan evaluasi pembina pramuka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kegiatan kepramukaan. Khususnya dalam menanamkan nilai kerja sama, tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan. Merancang program pramuka yang lebih partisipatif, inovatif dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Pembina dan guru bisa menggabungkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan cara yang lebih efektif dalam setiap aktivitas kepramukaan yang dilakukan.
- b) Bagi peserta didik: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai dari memiliki *civic skills* sebagai modal dalam berinteraksi di dalam masyarakat. Dapat meningkatkan keterampilan warga negara seperti berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan para peserta didik. Penelitian ini membantu peserta didik belajar menjadi lebih bertanggung jawab, berpikir secara kritis, disiplin, bekerja sama dengan orang lain, serta memiliki kemampuan memimpin. Di harapkan mereka bisa menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
- c) Bagi sekolah: Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi dasar pengembangan program kegiatan ekstrakurikuler untuk penguatan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi sekolah dalam mengevaluasi sejauh mana kegiatan kepramukaan tersebut efektif. Sekolah dapat

meningkatkan kualitas pembina pramuka untuk meningkatkan *civic skills* peserta didik. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi dasar dalam merancang kegiatan ekstrakurikuler yang lebih tepat sasaran, terencana dan bertujuan untuk pembentukan karakter serta keterampilan kewarganegaraan peserta didik.

- d) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik terkait pendidikan kepramukaan, dan pembentukan *civic skills*. Penelitian ini bisa berfungsi sebagai referensi atau standar untuk studi-studi sejenis di tingkat pendidikan, sehingga mampu memperluas ruang lingkup pengkajian akademis dalam sektor pendidikan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ekstrakurikuler

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar waktu belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, serta di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

2. Kepramukaan

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang didirikan oleh para pramuka sendiri, dengan tujuan memberikan pendidikan tentang kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang terlibat aktif dalam belajar dan menerapkan pendidikan kepramukaan serta menjalankan prinsip Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Kepramukaan mencakup berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pramuka. Pendidikan Kepramukaan merupakan cara membentuk kepribadian, keterampilan hidup, dan sifat baik serta budi pekerti pramuka melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepramukaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka).

3. *Civic Skills*

Cholisin (2010) mengatakan bahwa *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan adalah salah satu bagian penting dalam pembelajaran kewarganegaraan. *Civic skills* mencakup dua dimensi utama, yaitu keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*). Keterampilan intelektual bertujuan membentuk warga negara yang memiliki wawasan luas, mampu berpikir secara efektif, dan memiliki rasa tanggung jawab, terutama melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis.

F. Sistematika Skripsi

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan skripsi yang telah dirumuskan penulis:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat bagian tentang latar belakang dan penjelasan mengenai masalah yang diidentifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

Pada bagian ini terdapat dasar teori yang digunakan sebagai acuan. Penelitian ini dan kerangka pemikiran menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan menyelesaikan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut, serta analisis mengenai temuan yang didasarkan pada informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak terkait yang berkepentingan dan penelitian di masa depan.